

ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG 2020

Rifqi Zayyaan Prasetio, Puji Astuti, Fitriyah
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7460033
Laman : <https://fisip.undip.ac.id/> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peneliti mengkaji kinerja yang digunakan oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Dalam Pemilihan ini, KPU Kota Semarang menghadapi tantangan baru karena pandemi Covid-19. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, belum ada pemilihan umum yang diselenggarakan di tengah bencana nonalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian melakukan analisis secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui secara detail yang berkaitan dengan Kinerja KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Komisioner KPU Kota Semarang dan juga melalui dokumen pendukung yang dapat diperoleh serta diolah dari jurnal, internet, dan buku. Kinerja KPU Kota Semarang dinilai dengan lima kriteria, yakni Produktivitas, Orientasi Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Di masa pandemi, lima unsur tersebut sangatlah berperan dalam Pemilihan.

Kata Kunci: Analisis Kinerja, Pilwakot Semarang 2020, KPU, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Researcher reviewed the Semarang City Regional General Elections Commission's performance during 2020 Semarang Mayoral Election. In this electoral event, the general elections commission faced inconvenient challenges due to Covid-19 pandemic. It is an interesting case to unfold in this research, that general elections commission have embarked one-of-a-kind election during an unnatural disaster like the Covid-19 before. Descriptive qualitative method has been used in this research. Researcher wants to visualize the outmost real condition and initiates analysis to seek the details of Semarang City Regional General Elections Commission's performance when executing 2020 Semarang City Mayoral Election. Data has been covered by interviewing one of the commissioner from Semarang City RGEC, and with all documents, journals that provided the mentioned information. One of the most vital data source is a book with the title. Semarang City Regional General Elections Commission's performance is valued in five criteria, which are Productivity, Service Orientation Quality, Responsivity, Responsibility, and Accountability. During the pandemic, these five values are very critical and could be demanding than ever before in the process of managing an election.

Keywords: *Performance analysis, 2020 Semarang City Mayoral Election, General Elections Commission, Covid-19*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2020, Pemilihan Kepala Daerah diadakan serentak di seluruh di Indonesia dengan dasar hukum PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada serentak pada gelombang pertama diikuti oleh 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Salah satu daerah yang melangsungkan pemilihan kepala secara serentak adalah Kota Semarang.

Fenomena bencana non alam Covid-19 ini membuat pemerintah harus bijaksana bertindak. KPU mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan di tengah Bencana Non alam Covid-19. Peraturan ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan yang berguna untuk mencegah dan memperparah tingkat *positive rate* Covid-19.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 memiliki dua tantangan. Pertama, ini adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

pertama yang diselenggarakan dengan hanya ada satu peserta atau satu pasangan calon. Kedua, pemilihan ini berlangsung bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19. Ada kekhawatiran kepada partisipasi pemilih, sebagaimana tersebarnya wabah Covid-19 di Indonesia sedang meningkat secara signifikan dan belum ditemukannya penawar atau vaksin di waktu tersebut. Menurunnya partisipasi pemilih, berarti jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan pemilihan itu sendiri.

Pilwakot Semarang 2020 diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu Hendrar Prihadi (Hendi) – Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) diusung oleh sembilan partai; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan didukung oleh lima partai; Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya.

Dengan hanya ada satu pasangan calon, mulai dari tahap perencanaan sampai penyelenggaraan bukan sebuah alasan

untuk menganggap mudah tugas dan fungsi yang perlu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu. Justru hal ini memantik peserta, pemilih dan pengawas pemilihan untuk menyoroji kinerja KPU dan jajaran sebagai penyelenggara pemilihan. Satu kesalahan dan *miss-management* akan pasti terlihat. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan untuk memperkaya referensi dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari beberapa sumber, tidak ditemukan judul yang sama dengan yang ditulis. Penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Desta Trianggoro, 2015. "Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang pada Pemilihan Umum 2014".

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan adanya kendala-kendala KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan dari dimensi produktivitas sumberdaya manusia, anggaran yang terbatas dan sosialisasi yang tidak optimal.

- 2) Eunike Sintikhe Pelleng, 2017. "Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015". Penelitian ini didukung oleh berbagai sumber data berupa wawancara, arsip dan dokumen pendukung lainnya dapat disimpulkan dan dikaji dengan menggunakan instrumen indikator

penilaian, maka penilaian kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 ditentukan oleh kinerja dan produktivitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan dasar Teori Kinerja Agus Dwiyanto. Dalam mengukur kinerja organisasi publik di Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik:

- 1) Produktivitas

Tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Produktivitas KPU Kota Semarang dapat dilihat dari cara menetapkan DPT, sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan bentuk-bentuk kerja lain ke berbagai lapisan masyarakat.

- 2) Orientasi Kualitas Pelayanan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Orientasi KPU Kota Semarang dalam pelayanan dapat dibagi menjadi dua; kepada masyarakat sebagai pemilih dan kepada partai politik sebagai peserta Pemilihan. Kemudahan akses, kesiapan sumberdaya juga patut diperhatikan untuk menilai sebuah kualitas pelayanan.

3) Responsivitas

Kemampuan sebuah organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas KPU Kota Semarang dapat diukur dengan bagaimana kebutuhan masyarakat dijadikan sebagai program, tentu melalui ruang-ruang diskusi untuk menjangring informasi kebutuhan masyarakat.

4) Responsibilitas

Artinya, kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas bisa terukur lewat transparansi yang dilakukan. Dan semua yang dilakukan organisasi haruslah mampu dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel).

(Dwiyanto, 2008)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang analisis kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan

Pilwakot 2020, menggunakan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah “penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian. Penggunaan metode kualitatif dapat menghasilkan rincian data yang detail.” (Bogdan, 1975) . Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan hasil analisis kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2020.

“Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.” (Creswell, 2017)

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yang meliputi di dalam Kota Semarang dengan mengacu pada instansi KPU Kota Semarang.

Subjek penelitian yang ditentukan untuk menetapkan informan oleh penulis adalah dengan metode *purposive sampling*. Dengan metode ini, diharapkan dapat menjangring sebanyak mungkin informasi sehingga dapat mengumpulkan data yang

aktual, akurat, dan detail. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, dengan keterangan pengambilan sampel *non-random* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut di antaranya narasumber-narasumber tersebut dianggap sebagai subjek yang memahami aspek-aspek yang diteliti oleh penulis. Sehingga data yang dikumpulkan di kemudian hari dapat memudahkan penulis dan mendapatkan informasi dan data yang valid dan kredibel. Menurut Lofland, dijelaskan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan-tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, buku, arsip, dan lain-lain” (Suwandi, 2008). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, di antaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

“Sumber data primer didapatkan melalui catatan tertulis dan/atau perekaman *video/audio tape*, pengambilan foto/film. Sumber data utama didapatkan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha.” (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam klasifikasi data primer adalah wawancara dengan Anggota KPU Kota Semarang.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti : wawancara, dokumentasi, pencarian dokumen dan penelusuran data daring.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produktivitas

KPU Kota Semarang dapat dilihat produktivitasnya baik, salah satunya dalam menghasilkan Daftar Pemilih yang berkualitas, dari rangkaian DP4 sampai Pemeliharaan DPT. Dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dapat disimak bahwa sebagai penyelenggara, KPU Kota Semarang cukup produktif. Dari tingkatan atas sampai KPSS, semua program secara keseluruhan terlaksana, dengan segala kendala teknis yang dihadapi, namun dapat diatasi dengan *problem solving* yang baik dan benar. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom selalu mengingatkan dari jajaran atas sampai bawah, “segala rangkaian dan tahapan pemilihan ini harus diawali dengan benar.”

2. Orientasi Kualitas Pelayanan

Orientasi Kualitas Pelayanan KPU Kota Semarang dibagi dalam sisi pemilih (masyarakat) dan sisi peserta pemilihan (partai politik/calon). Dalam sisi masyarakat, masih banyak yang dikeluhkan terhadap prosedur-prosedur seperti DPT.

Pada saat tahapan DPS, sosialisasi dan tanggapan masyarakat dilaksanakan lebih dari satu minggu, sehingga harapannya masyarakat betul-betul berpartisipasi demi data pemilih yang akurat.

Semangat dalam berpartisipasi mulai dari pihak penyelenggara maupun pemilih, untuk pemilihan walikota ini cukup memberi pertanda kepada kualitas pelayanan dalam kinerja KPU Kota Semarang sudah cukup baik. Akses informasi yang begitu mudah diakses oleh siapa pun di era teknologi ini, memantik keselarasan kualitas pelayanan yang fokus kepada masyarakat dan pasangan calon, dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi waktu yang dapat digunakan. Sehingga, orientasi kualitas pelayanan ini juga menjadi bukti cukup baiknya produktivitas KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan.

3. Responsivitas

Responsivitas KPU Kota Semarang sangat baik, karena tidak hanya di ranah masyarakat, tetapi bagi Badan Ad Hoc di bawahnya, KPU Kota Semarang selalu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk penyelenggara di tingkat Kecamatan (PPK). Setiap keluhan, kendala, tantangan di lapangan di rapatkan dan dirembuk secara musyawarah, karena soliditas internal memengaruhi kinerja

eksternal. Semakin terserap aspirasi dari badan ad hoc, maka semakin mudah juga KPU Kota Semarang untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program-program KPU. Responsivitas internal yang tinggi juga menjadi faktor baiknya responsivitas KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas dalam artian sederhana merupakan tanggungjawab. Penyelenggaraan SPJ setiap tahunnya, pelaporan rutin seluruh bidang dan tahapan yang disajikan kepada sesama penyelenggara, pengawas, pasangan calon dan masyarakat, cukup kuat menyimpulkan bahwa responsibilitas KPU Kota Semarang tergolong baik.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas KPU Kota Semarang cukup baik, mengingat setiap program dalam semua tahapan selalu tegak lurus dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, selalu memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
KPU Kota Semarang menyelenggarakan Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020 di tengah pandemi.

Berikut kesimpulan berkaitan dengan kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut:

1. Produktivitas

KPU Kota Semarang telah menunjukkan tingkat produktivitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemilihan. Koordinasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan seluruh tahapan berjalan secara efisien, termasuk pendaftaran calon, kampanye, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pemungutan suara.

2. Orientasi Kualitas Pelayanan

KPU Kota Semarang menunjukkan kualitas yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat dan tentunya terpercaya mengenai pemilihan, memberikan panduan kepada pasangan calon, pemilih, serta menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

3. Responsivitas

KPU Kota Semarang merespons dengan baik setiap pertanyaan, permintaan, kritikan, saran atau keluhan yang diajukan oleh masyarakat terkait pemilihan. Mereka memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan relevan terhadap isu-isu yang muncul selama proses

penyelenggaraan pemilihan, serta berupaya menyelesaikan masalah dengan cermat dan segera.

4. Responsibilitas

KPU Kota Semarang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilihan dengan integritas dan profesional. Netralitas terjaga dalam memfasilitasi proses pemilihan, menghormati hak-hak calon dan pemilih, tidak membelakangi peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Akuntabilitas

KPU Kota Semarang menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemilihan ini. Secara terbuka, informasi mengenai anggaran, proses seleksi petugas pemilu, serta hasil pemilihan kepada publik disediakan secara masif dan mudah diakses oleh seluruh khalayak masyarakat. Tindakan dan keputusan yang diambil selama pemilihan cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, pengamatan cermat untuk teknologi informasi yang digunakan dalam pemilihan umum sangat diperlukan. Dengan kemajuan teknologi, bukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan berbasis teknologi pantang

kendala. *Server* yang rawan *bottle-neck* dan *error*, petugas pemilihan yang gagap teknologi, perlu diatasi dengan baik.

Penelitian ini disuguhkan dengan keterbukaan fasilitas informasi, sehingga patut diapresiasi KPU sebagai penyelenggara sudah terbukti terbuka informasinya untuk umum dan selalu aktual. Untuk itu, jika ke depan terdapat keterbatasan-keterbatasan akses umum, maka perlu dijadikan catatan penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve.
- Asshidiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2020). *Kota Semarang Dalam Angka 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Bogdan, T. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design - Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, S. (2005). *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gultom, H. C., Ulfah, N. M., Zaini, A., Abriyanto, H., & Suyanto. (2021). *Ada Apa Dengan PLWKTSMG2020*. (S. N. Andrian, Penyunt.) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: KPU Kota Semarang.
- Handyaningrat, S. (1985). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hapsari, N. M., Asy'ari, H., & Wisnaeni, F. (2016). Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2015. *Diponegoro Law Journal*, 5, 1-11.
- Hidayat, S. (2011). *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta: Teraju (Mizan Group).
- KPU Kota Semarang. (2020). Rencana Strategis 2020-2024 KPU Kota Semarang.
- KPU Kota Semarang. (2022, 11). *Struktur KPU Kota Semarang*. Diambil kembali dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang: https://drive.google.com/file/d/1_qPpmJXLXeMESdNYuUZBVhWdMW8XmPTO/view
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pelleng, E. S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. *Jurnal Politika*, 112-125.
- Ristyawati, A. (2020, 11). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19
Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85-96.

Robbins, S. P. (2008). *Organizational
Behaviour*. Jakarta: Salemba Empat.

Surbakti, P. R., & Nugroho, K. (2015).
*Studi Tentang Desain Kelembagaan
Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Suwandi, B. &. (2008). *Memahami
Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka
Cipta.

Trianggoro, D., Larasati, E., & Widowati,
N. (2015). Analisis Kinerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Semarang
(Dalam Pemilihan Umum 2014).
*Journal of Public Policy and
Management Review*.